BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Topik hubungan *family ownership* terhadap *firm performance,* serta *CEO duality* terhadap *firm performance* telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Penulis menggunakan hasil penelitian-penelitian tersebut sebagai pendukung pemikiran dan hasil penelitian penulis terkait hubungan *family ownership* dan *CEO duality* terhadap *firm performance* dengan menambahkan juga kondisi perusahaan yang memiliki koneksi politik (*political connection*) sebagai keterbaruan dalam penelitian ini.

1. Saeed et al., (2016) dengan judul "*Do Political Connections Affect Firm Performance? Evidence from a Developing Country*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang memiliki kemungkinan berkembang tidak dipengaruh koneksi politik. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan indikator yang sama dalam mengukur kinerja perusahaan (ROA) dan koneksi politik (*dummy variable*). Sedangkan perbedaannya adalah variabel independen yang digunakan berbeda yaitu *family ownership* dan (*CEO Dualit*y), penambahan variabel independen (*family ownership*), populasi penelitian yang digunakan berbeda (perusahaan manufaktur di Indonesia), serta periode penelitian yang terbaru dan lebih singkat (2016-2020).

2. Maaloul et al., (2018) dengan judul "*The effect of political connections on companies' performance and value: Evidence from Tunisian companies after the revolution"* Penelitian ini menguji hubungan antara koneksi politik terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Indikator pengukuran koneksi politik menggunakan *dummy variable*, indikator kinerja perusahaan menggunakan ROA dan Tobin's Q, dan indikator nilai perusahaan menggunakan logaritma kapitalisasi pasar (*the log of market capitalization*). Data yang digunakan berasal dari perusahaan nonfinansial yang terdaftar di Tunis Stock Exchange (TSE) pada periode 2012-2014 dengan sampel 96 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Koneksi politik meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Persamaan penelitian Maaloul et al., (2018) adalah menggunakan indikator yang sama dalam mengukur kinerja perusahaan. Sedangkan perbedaanya adalah menggunakan variabel independen yang berbeda (*Family Ownership & CEO Duality*), penambahan variabel independen (*Family Ownership*), populasi penelitian yang digunakan berbeda (perusahaan manufaktur di Indonesia), dan periode penelitian yang terbaru dan lebih panjang (2016-2020).
3. Wang dan Shailer (2017) mengulas penelitian mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja keuangan. Penelitian tersebut memberikan hasil, yaitu kepemilikan keluarga memantau manajer dan menyesuaikan kepentingan pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas, lebih baik dibandingkan kepemilikan nonkeluarga untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

4. Mutakkin *et al*. (2015) telah melakukan penelitian mengenai perusahaan keluarga, kinerja perusahaan, dan koneksi politik. Hasil penelitian yang dilakukan di Bangladesh memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang didominasi oleh kepemilikan keluarga telah berkinerja lebih baik daripada perusahaan nonkeluarga. Penelitian ini menghubungkan perusahaan keluarga dengan koneksi politik. Perusahaan keluarga yang memiliki koneksi politik memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sekarang, yaitu menggunakan kepemilikan keluarga dan *CEO duality* sebagai variabel independen, kinerja perusahaan sebagai variabel dependen, dan *political connection* sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian juga terletak pada regional penelitian dan variabel control yang digunakan.

Tabel *research gap* penelitian terdahulu secara lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory menggambarkan bahwa perilaku manajer selaras dengan tujuan pemegang saham, dimana manajer tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi melainkan berfokus pada tujuan utama untuk kepentingan organisasi. Dalam kaitanya dengan *CEO duality* menurut (Davis et al., 1997) *Stewardship theory* adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa *CEO duality* menggabungkan peran antara dewan komisaris dan dewan direksi sehingga menghasilkan kepemimpinan yang memiliki koordinasi yang baik terhadap setiap

lini, sehingga dapat mengambil keputusan secara efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut teori ini, adanya *CEO duality* dapat secara efektif mengurangi adanya ketidakseimbangan informasi (*assymetrical information*) antara manajer dan pemegang saham dan mengurangi adanya biaya informasi yang diperlukan. Ketidakseimbangan informasi merupakan suatu kondisi ketika informasi yang dimiliki oleh manajer yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan lebih banyak daripada pemegang saham. *Stewardship theory* memandang bahwa manajer bersedia untuk menurunkan kepentingan pribadinya demi mendukung kesejahteraan dan keuntungan perusahaan (Hernandez, 2012).

*Stewardship theor*y percaya bahwa ketika manajer aktif bergerak untuk meningkatkan kinerja perusahaan maka sebenarnya hal yang dilakukan oleh manajer tersebut juga merupakan proses untuk meningkatkan karirnya sendiri (Daily et al., 2003). Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang baik dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki karena dipengaruhi oleh adanya faktor nonfinansial seperti kepuasan atas prestasi, pengakuan, kehormatan, dan reputasi yang ingin didapatkan (Duru et al., 2016). Faktor-faktor tersebut menjadikan pemegang saham percaya bahwa *CEO duality* mampu memunculkan kepemimpinan yang kuat dalam perusahaan dengan arah strategi ke depan yang jelas (Lam & Lee, 2008).

Stewardship Theory mendukung adanya *CEO duality* karena adanya kepentingan atau tujuan yang sama dalam struktur manajemen puncak, sehingga mampu meminimalisir adanya konflik internal. Di Indonesia, *CEO duality* dijelaskan sebagai kondisi dimana terdapat dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan menjabat sebagai dewan direksi dan dewan komisaris dalam

perusahaan (Murhadi, 2009). Adanya hubungan kekerabatan dalam struktur dewan direksi dan dewan komisaris dapat mengurangi adanya konflik internal karena adanya keterikatan dalam bentuk hubungan kekerabatan tersebut. Seperti dalam penelitian (Arifai dkk., 2018), dewan komisaris dan dewan direksi yang memiliki hubungan kekerabatan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan karena adanya kepentingan yang sama, sehingga fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik dan berfokus dalam peningkatan kinerja perusahaan

2.2.2 *Resource Dependence Theory*

Pfeffer&salancik (1978) menjelaskan bahwa dalam *Resource Dependence Theory*, sebuah organisasi akan membangun hubungan kerja sama dan mengatur sumber daya yang dimiliki untuk menanggapi ketidakpastian lingkungan. Teori ini menganggap perusahaan sebagai suatu sistem terbuka yang tergantung pada variabel kontinjensi dalam lingkungan. Perusahaan dapat mencapai kesuksesan apabila saling bekerja sama dengan faktor eksternal di tengah ketidakpastian lingkungan. Teori ini menjadi salah satu dasar pemikiran mengapa perusahaan perlu untuk terlibat dalam sebuah hubungan eksternal.

Saling ketergantungan ketika digabungkan dengan ketidakpastian akan mengarah ke kesuksesan. Koneksi politik menjadi salah satu kekuatan utama di lingkungan eksternal dan menjadi dasar yang penting bagi perusahaan dalam menjalin hubungan eksternal (Hillman et al., 2009). Perusahaan akan berusaha untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki koneksi politik untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya langka yang dikendalikan oleh entitas eksternal (Pfeffer & Salancik, 1978). Koneksi politik dianggap sebagai

sebuah cara yang efektif untuk mengelola ketidakpastian lingkungan. Bentuk dari koneksi politik dalam perusahaan pada umumnya adalah hubungan antara dewan direksi dengan orang-orang dari pemerintahan atau anggota partai politik. Teori ini menunjukkan pentingnya perusahaan membangun hubungan dengan pihak eksternal melalui dewan direksi karena pada umumnya dewan direksi bertindak sebagai penyedia sumber daya yang kurang dalam internal perusahaan (Pfeffer & Salancik, 1978; Hillman et. al, 2009).

Resource Dependence Theory mendukung adanya koneksi politik dikarenakan koneksi politik merupakan salah satu bentuk hubungan eksternal perusahaan agar dapat mengurangi ketergantungan sumber daya dan faktor produksi yang tidak dimiliki perusahaan. Penelitian Muttakin dkk. (2016) menjelaskan bahwa perusahaan keluarga dengan koneksi politik cenderung memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan keluarga yang tidak memiliki koneksi politik. Di Indonesia, pada umumnya anggota dewan komisaris perusahaan merupakan seseorang yang memiliki hubungan kedekatan dengan politikus yang berada di pemerintahan yang juga memiliki kelompok bisnis lain, seperti mantan pejabat pemerintahan, politikus, atau pensiunan pejabat militer/kepolisiani (Arifai dkk, 2018).

2.2.3 *CEO duality*

Penelitian Hsu et. al (2019) menjelaskan bahwa *CEO duality* merupakan kondisi dimana seseorang memiliki dua jabatan sekaligus dalam perusahaan, yakni sebagai dewan direksi (*Chief Executive Officer*) dan dewan komisaris (*Chairman of Board*). Namun, terdapat beberapa negara yang memiliki definisi berbeda terkait *CEO duality* karena perbedaan peraturan yang ada pada negara-negara tersebut.

Terdapat dua sistem *corporate governance* yang dianut oleh negara-negara pada umumnya, yaitu *one-tier board* dan *two-tier board* (Yun & Tan, 2011). Sistem *one-tier board* menjadikan dewan pengawas dan dewan pelaksana menjadi satu wadah yang sama. Sistem *one-tier board* ditandai dengan adanya individu yang memiliki fungsi sebagai dewan pengawas dan dewan pelaksana, sehingga dimungkinkan adanya rangkap jabatan. Sedangkan sistem *two-tier board* membagi struktur kepemimpinan perusahaan menjadi dua, yaitu dewan pengawas dan dewan pelaksana. Sistem *two-tier board* ditandai dengan adanya pemisahan ketat antara fungsi pengawasan dan fungsi manajemen dan anggota salah satu dewan tidak bisa menjadi anggota dewan yang lain, sehingga tidak dimungkinkan adanya rangkap jabatan (Tan, 2011).

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 yang berlaku di Indonesia, perusahaan diharuskan menganut sistem *two-tier board* yang mengatur tentang pemisahan fungsi dan peran dewan direksi dan dewan komisaris. Adanya sistem tersebut menjadikan perusahaan tidak dimungkinkan untuk memiliki seseorang yang merangkap jabatan sebagai dewan direksi dan dewan komisaris sekaligus. Namun, karena adanya peraturan tersebut banyak perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kekerabatan dalam penempatan jabatan sebagai dewan komisaris dan dewan direksi, sehingga terdapat dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan menjabat sebagai dewan direksi dan dewan komisaris dalam perusahaan. Sehingga, di Indonesia, *CEO duality* didefinisikan sebagai kondisi dimana terdapat dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan menjabat sebagai dewan direksi dan dewan komisaris dalam perusahaan (Murhadi, 2009). Berdasarkan penjelasan diatas, maka *CEO duality* menggunakan pengukuran *dummy variable* dengan nilai

0 dan 1. Jika tidak terdapat *CEO duality* dalam struktur dewan direksi perusahaan, maka diberikan angka 0. Namun, jika terdapat *CEO duality* dalam struktur dewan direksi perusahaan, diberikan angka 1

2.2.4 *Political Connection*

Sebuah perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik jika salah satu yang menjabat sebagai dewan direksi atau CEO merupakan anggota dari parlemen, menteri, atau seseorang yang terkait erat dengan partai politik atau politisi (Faccio, 2006). Koneksi politik dalam lingkup struktur kepemimpinan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, misalnya dalam bentuk pemberian subsidi dari pemerintah, potongan pajak, kekuatan pasar, dan lain sebagainya (Al-dhamari, 2016). Sehingga, apabila perusahaan mampu memanfaatkan keuntungan dengan adanya koneksi politik tersebut, maka perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Aturan mengenai koneksi politik di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum-Bank Sentral Republik Indonesia. Di dalam peraturan tersebut, terdapat penjelasan *Mengenai Politically Exposed Persons (PEP).* Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.10/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan non-Bank, pihak-pihak yang terkait dengan PEP terdiri dari:

1. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan
2. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan
3. Pejabat setingkat Menteri
4. Eksekutif Senior perusahaan negara
5. Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

6. Eksekutif dan ketua partai politik
7. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian
8. Pejabat senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Negeri
9. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden
10. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, imenantu, cucu) dari kategori-kategori di atas
11. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas, namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, kepopulerannya dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Lembaga Keuangan Non-Bank dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi
12. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Persons)

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik ketika struktur kepemimpinan perusahaan sedang atau pernah memiliki jabatan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau kepala pemerintahan, pejabat setingkat menteri, eksekutif senior di perusahaan negara, eksekutif atau ketua partai politik, pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian, pejabat senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Negeri, pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden, atau anggota keluarga dari pejabat yang telah diuraikan sebelumnya. *Political connection* menggunakan pengukuran *dummy variabel* dengan nilai 0 dan 1. Jika tidak terdapat koneksi politik dalam perusahaan, maka diberikan angka 0. Namun, jika terdapat koneksi politik dalam perusahaan, diberikan angka 1.

2.2.5 Kinerja Perusahaan

Laporan keuangan sangat diperlukan bagi *stakeholder* dalam perusahaan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Manajer memerlukan adanya laporan keuangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kreditur memerlukan laporan keuangan untuk mengevaluasi kemungkinan pembayaran pinjaman. Pemegang saham memerlukan laporan keuangan untuk melakukan proyeksi terkait laba, dividen, dan harga saham. Cara perusahaan melakukan analisa kinerjanya adalah dengan cara menganalisa laporan keuangan perusahan, dimana hal tersebut mencakup perbandingan antara kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan mengevaluasi kecenderungan posisi keuangan perusahaan dalam sepanjang waktu. Salah satu cara yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja perusahaan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dan memberikan memberikan gambaran atau pengukuran relatif dari kinerja operasional perusahaan. Menurut Fadah (2006: 42-45), pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas

   Rasio likuiditas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dan jangka panjang pada saat jatuh tempo. Rasio likuiditas terdiri dari *current ratio, cash ratio, quick ratio,* dan *working capital to total assets ratio.*

2. Rasio aktivitas

Rasio aktivitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki. Rasio aktivitas terdiri dari total *assets turnover, account receivable turnover, average collection period, inventory turnover, average day's inventory* dan *working capital turnover.*

3. Rasio *leverage*

   Rasio leverage merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Rasio leverage terdiriidari *total debtito equity ratio, total debt to total assets, long term debt to equity ratio, tangible assets debt coverage,* dan *timesi nterest earned ratio.*

4. Rasio rentabilitas

   Rasio rentabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam pengambilan kebijakanidan keputusan yang ditunjukkan dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan investasi. rasio rentabilitas terdiri dari *net profit margin, operatingiprofit margin, grossiprofit margin, return on*i*assets, return oniequity, return on investment, operating ratio.*

5. Rasio Nilai Pasar

   Rasio nilai pasar merupakan indikator yang digunakan untuk memberikan petunjuk atas pemikiran investor terhadap kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa yang akan datang. Rasio nilai pasar terdiri dari *price earning ratio* dan *market/book ratio*.

Dari kelima rasio tersebut, rasio yang berkaitan dengan kinerja perusahaan berbasis akuntansi adalah *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan bagian dari rasio rentabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset aset yang dimiliki dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan laba. ROA merupakan indikator pengukuran kinerja yang umum dalam akuntansi dan sering digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan (Hsu et. al, 2019). ROA dihitung dengan membagi laba bersih (*net income*) dengan total aset pada tahun yang bersangkutan (*total assets*) mengikuti penelitian sebelumnya dari Maaloul at. Al, (2018) dan Hsu at. al, (2019). ROA memberika ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan dikarenakan menunjukan seberapa efektif manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendanaan.

2.3 Model Empiris

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh *Family Ownership* dan *CEO Duality* terhadap *Firm Performance* dengan *Political Connection* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020. Model empiris menggambarkan alur konsep dan pemikiran secara garis besar dalam penelitian yang dilakukan. Gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara variabel independen yaitu *family ownership* dan *CEO duality* yang akan memengaruhi variabel dependen yaitu kinerja perusahaan dan variabel moderasi yaitu *political connection* yang akan memoderasi hubungan *family ownership* dan CEO *duality* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang bertujuan untuk mengendalikan hubungan antara pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen agar tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hubungan antara *family ownership* dan CEO *duality* terhadap kinerja keuangan dapat dijelaskan melalui beberapa teori. *Stewardship theory* mendukung adanya CEO duality karena adanya kepentingan atau tujuan yang sama dalam struktur manajemen puncak, sehingga mampu meminimalisir adanya konflik internal. *Resource dependence theory* mendukung adanya koneksi politik dikarenakan koneksi politik merupakan salah satu bentuk hubungan eksternal perusahaan agar dapat mengurangi ketergantungan sumber daya dan faktor produksi yang tidak dimiliki perusahaan. Menurut Anderson dan Reeb (2003), pengendalian perusahaan oleh anggota keluarga memiliki kepentingan untuk meminimalisai konflik keagenan dalam menciptakan nilai perusahaan dan lebih fokus pada memindahkan kekayaan antar generasi.

Dalam upaya mencapai tujuan penelitian, analisis yang dilakukan adalah analisis SPSS. Hasil pengujian dijelaskan melalui pembahasan penelitian dan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan melalui penelitian Gambar alur konsep dan pemikiran hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian

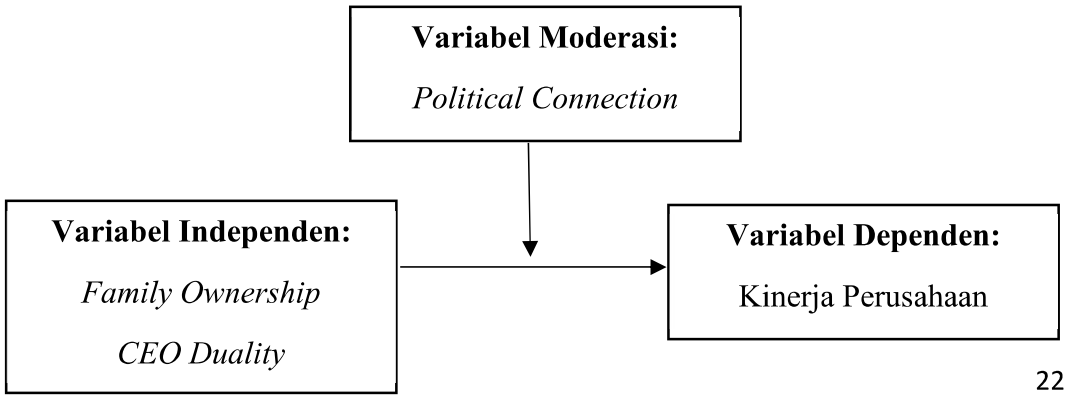

2.3.1 Pengaruh F*amily Ownership* terhadap Kinerja Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016 - 2020

Menurut Anderson dan Reeb (2003), pengendalian perusahaan oleh anggota keluarga memiliki kepentingan untuk meminimalisasi konflik keagenan dalam menciptakan nilai perusahaan dan lebih fokus pada memindahkan kekayaan antar generasi. Keputusan yang telah ditetapkan oleh perusahaaan kepemilikan keluarga akan dilaksanakan secara optimal sehingga mampu memengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Mutakkin *et al*., 2016) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Harymawan *et al.,* 2019) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara perusahaan keluarga dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, diajukan hipotesis :

H1: *family ownership* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016 - 2020

2.3.2 Pengaruh *CEO Duality* terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016 - 2020

CEO duality di Indonesia diartikan sebagai kondisi adanya hubungan kekerabatan antara anggota direksi dan anggota komisaris dalam suatu perusahaan (Murhadi, 2009). Perbedaan pengertian antara *CEO duality* di Indonesia dan di negara lain disebabkan karena adanya peraturan UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang sistem *two-tier board* dimana mengharuskan adanya pemisahan

peran antara dewan direksi dan dewan komisaris, sehingga tidak dimungkinkan seseorang menjabat sebagai direksi dan komisaris. Sehingga di Indonesia *CEO duality* ditunjukan dengan banyaknya perusahaan terutama perusahaan keluarga yang memiliki dewan komisaris dan dewan direksi yang masih terikat oleh hubungan kekerabatan (pasangan, orang tua, saudara, anak menantu, cucu, keponakan).

Stewardship theory mendukung adanya *CEO duality* dalam perusahaan karena teori ini menganggap bahwa adanya *CEO Duality* dapat secara efektif mengurangi adanya ketidakseimbangan informasi (*assymetrical information*) antara manajer dan pemegang saham dan mengurangi adanya biaya informasi yang diperlukan. Asumsi penting dalam *stewardship theory* adalah bahwa perilaku manajer selaras dengan kepentingan pemegang saham. Hal ini dikarenakan *stewardship theory* percaya bahwa ketika manajer bergerak aktif dalam meningkatkan performa perusahaan, maka sebenarnya manajer tersebut sedang dalam proses untuk meningkatkan karirnya sendiri (Daily et. al, 2003). *Stewardship theory* juga menyatakan bahwa terdapat faktor non-finansial seperti kepuasan atas prestasi, pengakuan, kehormatan, dan reputasi yang akan memotivasi manajer dalam mengejar kinerja perusahaan yang baik dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki (Duru et. al, 2016). Adanya dewan komisaris dan dewan direksi yang memiliki hubungan kekerabatan di Indonesia akan mengurangi adanya ketidakseimbangan informasi dan biaya informasi yang ada, terlebih bila kedua individu dalam jabatan tersebut juga memiliki hubungan dengan pemegang saham. Sehingga, dewan komisaris dan dewan direksi bisa fokus untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian dari Arifai et. al (2018) menunjukkan bahwa

hubungan keluarga dalam dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dewan komisaris dan dewan direksi yang memiliki hubungan kekerabatan membantu menyeimbangkan fungsi supervisor dan fungsi manajemen, sehingga menghasilkan pengawasan dalam manajemen perusahaan yang lebih efektif. Sehingga, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: *CEO duality* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016 - 2020

2.3.3 Pengaruh *Family Ownership* dan CEO *Duality* terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Political Connection* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016 - 2020

Seperti halnya perusahaan di negara lainnya, perusahaan di Indonesia juga tidak terlepas dari adanya koneksi politik, terutama bagi perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi. Sejalan dengan adanya *Resource Dependence Theory*, perusahaan penting untuk membangun hubungan dengan pihak eksternal, seperti orang-orang dari pemerintahan atau anggota partai politik untuk mengurangi ketergantungan sumber daya langka yang dimiliki oleh entitas eksternal (Pfeffer & Salancik, 1978). Adanya etika balas budi yang masih kental di Indonesia juga memberikan pandangan bahwa perusahaan memerlukan koneksi politik untuk mendapatkan keuntungan, termasuk bagi perusahaan keluarga. Pada awalnya kebanyakan perusahaan di Indonesia adalah perusahaan keluarga, kemudian berkembang dan menjadi perusahaan publik. Kondisi ini memunculkan banyak kasus dimana orang tua sebagai dewan komisaris dan anaknya sebagai

dewan direksi. Oleh karena itu, *CEO duality* pada umumnya terdapat pada perusahaan dengan mayoritas kepemilikan dimiliki oleh keluarga (Lam & Lee, 2008)

Koneksi politik mampu mengurangi kompetisi antar perusahaan dengan industri yang sama dalam persaingan pasar (Wangi at. al, 2017). Dewan komisaris atau dewan direksi dalam perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat memanfaatkannya menjadi aset yang berharga untuk menciptakan akses atas factor-faktor produksi atau sumber daya modal lainnya, sehingga perusahaan dengan koneksi politik memiliki keunggulan kompetitif atas perusahaan lain dalam industri yang sama. Di Indonesia, anggota dewan komisaris biasanya memiliki hubungan dekat dengan pemegang saham dan memiliki jaringan komunikasi dengan politikus yang berada di pemerintahan yang juga memiliki kelompok bisnis lain, seperti mantan pejabat pemerintahan, politikus, iatau pensiunan pejabat militer/kepolisiani (Arifai dkk, 2018). Penelitian dari Muttakin et. al (2016) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga dengan koneksi politik memiliki kinerja lebih baik daripada perusahaan keluarga yang tidak memiliki koneksi politik. Sehingga, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: *Political Connection* memperkuat *Family Ownership* dan CEO *Duality* terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016 - 2020